

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Constitutional Law: Implikasi Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan Terhadap Sistem Bernegara Lithuania

Nur Rohim Yunus *

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



10.15408/adalah.v5i5.38454

Abstract:

There is a mixed system of governance in the Republic of Lithuania, which is a unitary republic located in the northeastern part of Europe. The system is mainly influenced by parliament. The prime minister and his cabinet hold the primary executive power in this system, while the Seimas, which corresponds to the national parliament, are the ones who hold the legislative power. In spite of the fact that there is a president who serves as the head of state, the president's powers are more restricted than in other presidential systems, with the primary emphasis being placed on matters pertinent to defense and foreign policy. A commitment to democratic values, integration with Western countries, and efforts to promote national identity and maintain the cultural legacy of the country are all emphasized by the method of government that is utilized in Lithuania.

Keywords: Lithuania; Form of state; Form of government; Government system

* Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi dan legislasi Nasional (Poskolegnas), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Email: nurrohimyunus@uinjt.ac.id.

A. PROLOG

Lituania adalah negara berdaulat yang terletak di wilayah timur laut Eropa, berbatasan dengan Latvia di utara, Belarusia di timur dan selatan, Polandia di selatan, dan Laut Baltik di barat. Lituania, sebagai salah satu dari tiga negara Baltik selain Latvia dan Estonia, memiliki latar belakang sejarah yang signifikan dan warisan budaya yang khas.

Lituania memiliki latar belakang sejarah yang kaya yang mencakup puncak Kadipaten Agung Lituania, sebuah entitas terkemuka di Eropa Timur selama abad ke-14 dan ke-15. Lituania dan Polandia bergabung pada abad ke-16 menjadi Republik Polandia-Lituania. Lituania dimasukkan ke dalam Uni Soviet setelah Perang Dunia II.¹

Proklamasi kemerdekaan Lituania dari Uni Soviet pada tahun 1990 menandai masuknya Lituania ke dalam trio negara Baltik yang mencapai kebebasan pada periode tersebut. Peristiwa ini memicu transformasi signifikan dalam sejarah Eropa Timur. Vilnius, ibu kota Lituania, terkenal dengan gaya arsitektur barok dan ortodoksnya yang luar biasa, menjadikannya kota bersejarah yang penting. Pusat

¹ Pivoras, S. (2008). Post-soviet transformation of bureaucracy in Lithuania: main features and trends. *Baltic Journal of Law & Politics*, 1(1), 111-131.

kota penting lainnya adalah Kaunas, yang terkenal dengan warisan sejarah dan budayanya yang melimpah. Bahasa Lituania, salah satu anggota rumpun bahasa Baltik, berfungsi sebagai bahasa resmi yang ditunjuk, menunjukkan kemiripan yang mencolok dengan bahasa Latvia.²



Lituania telah mengalami ekspansi ekonomi yang besar setelah pembebasannya dari Uni Soviet. Perekonomian wilayah ini bergantung pada beberapa industri, termasuk industri, pertanian, dan teknologi informasi. Perkembangan ekonomi Lituania dipengaruhi secara positif oleh aksesinya ke Uni Eropa pada tahun 2004.³

Lituania menghadirkan beragam tujuan wisata menawan, meliputi pusat kota bersejarah, kawasan pesisir sepanjang Laut Baltik, dan taman nasional yang indah, terutama Taman Nasional Curonian Spit, yang telah ditetapkan sebagai situs Warisan Dunia UNESCO. Budaya Lituania dicirikan oleh kekayaan tradisi yang meliputi musik, tari, seni visual, dan sastra. Setiap tahun, pertemuan budaya seperti Festival Seni Musim Panas Vilnius menarik banyak wisatawan.

² Pivoras, S. (2010). Model of civil service in Lithuania's public policy. *Baltic Journal of Law & Politics*, 3(1), 99-124.

³ Nakrošis, V. (2022). Lithuanian Civil Service Reform 1990–2018: From the Communist Legacy to a Professional Administration. In *Public Service Evolution in the 15 Post-Soviet Countries: Diversity in Transformation* (pp. 327-363). Singapore: Springer Nature Singapore.

Selain terus berkembang setelah memperoleh kemerdekaannya, Lituania merupakan negara yang memiliki identitas kuat dan memainkan peran yang semakin signifikan baik di kawasan Baltik maupun Eropa Timur.

Konstitusi Lituania, terkadang disebut sebagai "Hukum Dasar Republik Lituania", diratifikasi pada tahun 1992 setelah Lituania memperoleh kemerdekaan dari Uni Soviet. Pembentukan konstitusi ini meletakkan dasar bagi sistem pemerintahan republik parlementer di negara tersebut. Konstitusi ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu alokasi kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, perlindungan hak asasi manusia, kerangka pemilu, otonomi entitas lokal, dan prinsip-prinsip dasar pemerintahan demokratis. Banyak revisi telah dilakukan terhadap Konstitusi Lituania setelah diberlakukannya, namun konstitusi ini tetap berfungsi sebagai instrumen hukum utama yang mengatur negara tersebut.⁴

Konstitusi Lituania memiliki berbagai ciri khas yang membedakannya dengan konstitusi negara lain, seperti:⁵

⁴ Šinkūnas, H. (2021). Constitutional Principles as a Criterion for Declaring Legal Regulation to Be Incompatible with the Constitution of the Republic of Lithuania. *Legal Developments During 30 Years of Lithuanian Independence: Overview of Legal Accomplishments and Challenges in Lithuania*, 245-260.

⁵ Bakaveckas, A., & Krikščiūnas, B. (2021). Regulation of the principle of separation of powers in the constitution of the Republic of Lithuania. In *SWS International scientific conference on social s*

Pertama: Pemulihan Kemerdekaan. Lituania memberlakukan Konstitusinya sejak tahun 1990 setelah memperoleh kembali kemerdekaannya dari Uni Soviet. Oleh karena itu, hal ini mencerminkan inti dari upaya untuk mendapatkan kembali otonomi nasional dan menjadi landasan bagi sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi.

Kedua: Perlindungan Lingkungan Hidup. Konstitusi Lituania unik karena secara eksplisit memasukkan hak-hak lingkungan hidup, sehingga membedakannya dari konstitusi lain di seluruh dunia. Menurut Pasal 53 Konstitusi Lituania, setiap individu berhak atas lingkungan yang sehat, dan merupakan tanggung jawab negara untuk menjaga lingkungan.

Ketiga: Perlindungan Bahasa dan Budaya. Konstitusi Lituania memberikan penekanan yang signifikan pada bahasa dan budaya bangsa. Bahasa resmi Lituania adalah bahasa Lituania, dan konstitusinya sangat menekankan pelestarian sejarah budaya dan bahasa Lituania.⁶

Keempat: Perlindungan Hak Asasi Manusia. Konstitusi Lituania memberikan perlindungan komprehensif terhadap sejumlah hak asasi manusia, yang mencakup hak untuk menjalankan kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, akses terhadap pendidikan, dan hak atas peradilan yang adil dan

⁶ Pūraitė-Andrikiėnė, D. (2020). Objects of Verification of the Constitutionality of Legal Acts in the Constitutional Court of the Republic of Lithuania. *Teisė*, 116, 72-91.

tidak memihak. Konstitusi juga menggarisbawahi pentingnya pelarangan segala bentuk prasangka atau bias atas dasar ras, agama, gender, dan latar belakang etnis.⁷

Kelima: Sistem Parlementer. Sistem pemerintahan republik parlementer di Lituania ditetapkan oleh Konstitusi Lituania, di mana Seimas, parlemen nasional, memegang kekuasaan legislatif tertinggi. Presiden Lituania, meskipun mempunyai peran penting, memiliki cakupan kewenangan yang agak terbatas dibandingkan dengan beberapa sistem presidensial lainnya.

Konstitusi Lituania memiliki ciri khas yang tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip dasar demokrasi, namun juga mengutamakan perlindungan lingkungan, budaya, dan hak asasi manusia.



⁷ Pūraitė-Andrikienė, D. (2023). Towards an Effective Constitution in Lithuania: the Role of the Constitutional Court. *Review of Central and East European Law*, 48(2), 134-165.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Negara Lithuania dan implikasinya dalam Pembagian Wilayah

Lituania, sebagai negara non-federal, tidak menerapkan sistem pembagian wilayah seperti negara federal. Lithuania, sebaliknya, adalah negara kesatuan yang dicirikan oleh pemerintahan pusat yang memiliki otoritas tertinggi dan menjalankan kendali atas semua divisi administratif di bawah yurisdiksinya.⁸

Lituania secara geografis terbagi menjadi sepuluh kabupaten (apskritis) dan tiga kota (Vilnius, Kaunas, Klaipāda); Namun, penting untuk dicatat bahwa entitas-entitas ini tidak memiliki status yang sama dengan negara bagian dalam sistem federal. Meskipun daerah-daerah dan kota-kota tersebut mempunyai otonomi daerah pada tingkat tertentu, pemerintah pusat tetap mempunyai kewenangan atas isu-isu penting.

Lituania memiliki kerangka administratif yang terstruktur dengan cermat yang secara efektif membagi wilayah negara menjadi distrik (apskritis) dan kota yang berbeda. Tujuan dari pemekaran ini adalah untuk mengefektifkan pengelolaan dan pemberian pelayanan publik di tingkat masyarakat. Meskipun kabupaten dan kota mempunyai otonomi daerah dalam bidang tertentu, seperti pendidikan

⁸ Jarašiūnas, E. (2004). The 1992 Constitution of the Republic of Lithuania in the wider context of constitutional development. Jurisprudence. Vilnius: LTU Leidybos centras, 2004, vol. 50 (42).

dan infrastruktur, pemerintah pusat tetap mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan penting.

Akibatnya, struktur pemerintahan di Lituania bersifat kesatuan, bukan federal, yang berarti kekuasaan politik terkonsentrasi di pemerintah pusat dan tidak terdistribusi secara signifikan di berbagai aspek negara.

2. Bentuk Pemerintahan Lituania dan implikasinya dalam Lembaga Perwakilan Rakyat

Lituania adalah negara Republik, bukan monarki. Di Republik, kepala negara biasanya dipilih oleh rakyat atau ditunjuk oleh badan pemerintahan, sedangkan di Monarki, kepala negara adalah seorang raja yang memegang jabatan raja atau ratu dan diwariskan dari generasi ke generasi.⁹

Catatan sejarah Lituania menggambarkan masa lalu yang panjang sebagai sebuah wilayah yang tangguh. Selama abad ke-14 dan ke-15, Kadipaten Agung Lituania muncul sebagai kekuatan terkemuka di Eropa Timur, memiliki wilayah yang semakin berkembang dan mempunyai pengaruh politik yang besar di wilayah tersebut. Pada abad ke-16, Lituania dan Polandia bergabung menjadi Republik Polandia-Lituania, yang kemudian disebut sebagai Persemakmuran Polandia-Lituania. Pada saat itu,

⁹ Pūraitė-Andrikiėnė, D. The Lithuanian Constitutional Court: The gradual emergence of a strong guardian. In *Constitutional Review in Central and Eastern Europe* (pp. 168-189). Routledge.

Persemakmuran ini merupakan salah satu negara paling ekspansif di Eropa dan mempunyai pengaruh signifikan terhadap politik dan budaya di wilayah tersebut.

Namun demikian, setelah era ini, Lituania tidak lagi menjadi negara monarki. Lituania memproklamkan kemerdekaannya dan mendirikan republik berdaulat pada tahun 1918, setelah berakhirnya Perang Dunia I. Meskipun direbut oleh Uni Soviet pada tahun 1940 dan kemudian memperoleh kembali kemerdekaannya pada tahun 1990, Lituania terus mempertahankan statusnya sebagai republik yang bercirikan sistem pemerintahan yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi dan kebebasan politik.

Dalam gaya pemerintahan Republik, otoritas politik berada di tangan rakyat atau perwakilan terpilih. Di Lituania, Seimas, parlemen nasional, bertanggung jawab menegakkan kekuasaan politik sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Seimas adalah lembaga legislatif tertinggi di Lituania, yang terdiri dari satu kamar di mana anggotanya dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum yang diadakan setiap empat tahun. Tanggung jawab utama Seimas meliputi pembuatan undang-undang, pengawasan pemerintahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi negara.

Sistem pemerintahan Republik ditandai dengan pembagian kekuasaan antara lembaga

perwakilan rakyat (Seimas) dan pemerintahan eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri. Seimas memiliki yurisdiksi untuk membuat undang-undang dan mengawasi operasional pemerintahan, sementara pemerintah memikul tanggung jawab atas implementasi kebijakan dan administrasi rutin negara.

Sistem politik di Lituania yang dikenal dengan sistem Republik ditandai dengan adanya pembagian kekuasaan antara lembaga perwakilan rakyat (Seimas) dan pemerintahan eksekutif. Pengaturan ini sejalan dengan konsep dasar demokrasi perwakilan dan pembagian kekuasaan yang terkendali.



3. Sistem Pemerintahan Lituania dan implikasinya dalam Lembaga Kepresidenan

Struktur pemerintahan Republik Lituania dicirikan oleh sistem campuran, dengan penekanan lebih besar pada pemerintahan parlementer. Pemerintah, dipimpin oleh seorang perdana menteri, memegang otoritas eksekutif utama dalam sistem ini. Meskipun demikian, presiden mempunyai peran

penting dalam bidang politik dan pemerintahan nasional.¹⁰

Di Lituania, Seimas, yang sering dikenal sebagai parlemen nasional, berfungsi sebagai otoritas legislatif tertinggi yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan. Seimas dipilih melalui pemungutan suara langsung dalam pemilihan umum yang diadakan empat tahunan. Seimas, dalam kapasitasnya sebagai badan legislatif, mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang, mengawasi kebijakan pemerintah, dan melaksanakan berbagai tugas legislatif.¹¹

Struktur pemerintahan Lituania dicirikan oleh penunjukan perdana menteri, yang biasanya berasal dari partai mayoritas atau koalisi dalam Seimas. Tanggung jawab pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan urusan negara sehari-hari terletak pada perdana menteri dan kabinetnya.



Presiden Lituania memegang posisi otoritas tertinggi di negara tersebut dan memiliki otoritas eksekutif khusus, yang mencakup bidang-bidang seperti

¹⁰ Prokop, K. (2016). Functions of the President of the Republic of Lithuania in the Light of the Constitution of 1992. *Bialstockie Studia Prawnicze*, 20, 273.

¹¹ Žemčiugov, A. (2019, May). Significance and peculiarities of the Constitution of the Republic of Lithuania. In *INDIVIDUAL. SOCIETY. STATE. Proceedings of the International Student and Teacher Scientific and Practical Conference* (pp. 294-301).

kebijakan luar negeri, pertahanan, dan keamanan nasional. Namun demikian, kewenangan presiden agak terbatas dibandingkan dengan sistem presidensial lainnya, dan biasanya berfungsi sebagai perwujudan simbolis bangsa di panggung global.

Oleh karena itu, meskipun terdapat presiden yang kuat di Lituania, struktur pemerintahan negara tersebut menunjukkan orientasi parlementer. Hal ini berarti perdana menteri dan kabinetnya memikul tanggung jawab utama atas kekuasaan administratif sehari-hari, sementara keterlibatan presiden dalam pengambilan keputusan politik hanya bersifat simbolis dan terbatas.

Di Republik Lituania, pembagian kekuasaan antara Presiden dan Perdana Menteri berkaitan dengan fungsi eksekutif tertentu yang dijalankan oleh masing-masing.¹²

Presiden mempunyai peran penting dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri. Ia mempunyai peran penting dalam urusan internasional, memikul tanggung jawab untuk menegakkan otonomi negara dan memperkuat posisi Lituania di kancah global. Presiden mengambil peran sebagai pemimpin tertinggi Angkatan Bersenjata Lituania dan memiliki yurisdiksi atas urusan militer dan keamanan nasional. Presiden mempunyai

¹² Mesonis, G. (2008). The President of the Republic of Lithuania and the Constitutional Principle of the Separation of Powers. *Jurisprudencija: mokslo darbai*. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2008, Nr. 9 (111).

kewenangan yang signifikan dalam menunjuk pejabat tertentu, termasuk kemampuan menunjuk hakim Mahkamah Konstitusi dan Jaksa Agung. Namun, penting untuk dicatat bahwa keputusan-keputusan ini biasanya memerlukan izin atau rekomendasi dari lembaga lain.¹³

Sebaliknya, Perdana Menteri dan kabinetnya memikul tanggung jawab atas kebijakan dalam negeri dan operasional pemerintah sehari-hari. Mereka terlibat dalam pengembangan dan pelaksanaan inisiatif kebijakan di berbagai bidang, termasuk namun tidak terbatas pada ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Implementasi undang-undang yang disahkan oleh Seimas juga merupakan tanggung jawab perdana menteri dan kabinet. Perdana Menteri adalah orang yang ditunjuk oleh Seimas untuk menjabat sebagai kepala pemerintahan, dan kabinetnya harus mendapat kepercayaan dan dukungan dari Seimas. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengakui pentingnya hubungan pemerintah-parlemen, karena pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk bertanggung jawab kepada Seimas atas kebijakan-kebijakannya.

Alokasi kekuasaan yang disebutkan di atas merupakan indikasi dari prinsip konstitusional yang dijunjung tinggi oleh Republik Lituania, dimana kekuasaan eksekutif didistribusikan antara Presiden

¹³ Pūraitė-Andrikienė, D. (2023). Towards an Effective Constitution in Lithuania: the Role of the Constitutional Court. *Review of Central and East European Law*, 48(2), 134-165.

dan Perdana Menteri, dengan penekanan yang jelas pada peran unik yang mereka jalankan dalam struktur pemerintahan negara tersebut.¹⁴

Lituania secara aktif berupaya meningkatkan kolaborasi dengan negara-negara Barat dan membebaskan diri dari pengaruh Rusia di arena global. Kebijakan luar negeri Presiden yang pro-Barat dan dukungan kuat terhadap integrasi dengan Uni Eropa dan NATO merupakan indikasi dari perspektif ini. Lithuania telah menunjukkan dedikasi yang kuat untuk mendorong integrasi dengan negara-negara Barat, yang ditunjukkan dengan keanggotaan penuhnya di Uni Eropa dan NATO. Pernyataan ini menunjukkan upaya untuk meningkatkan hubungan politik, ekonomi, dan keamanan dengan negara-negara Barat yang menganut prinsip demokrasi dan menjunjung tinggi kebebasan.

Lituania telah menunjukkan langkah-langkah proaktif dalam meningkatkan otonomi energi dan menjaga keamanan nasionalnya, dengan tujuan mengurangi ketergantungannya pada Rusia. Selain itu, negara ini telah muncul sebagai pendukung utama dalam mengatasi agresi Rusia, khususnya setelah aneksasi Krimea oleh Rusia pada tahun 2014.

Lithuania resmi bergabung dengan NATO pada tahun 2004 dan selanjutnya bergabung dengan Uni Eropa pada tahun yang sama. Dimasukkannya

¹⁴ Šaparnienė, D., & Lazauskienė, A. (2012). Local government in Lithuania. *Local government in the Member States of the European Union: a comparative legal perspective*, 389-410.

Lituania ke dalam kedua aliansi ini memberikan bantuan keamanan dan ekonomi yang kuat, sehingga memperkuat posisi Lituania di kancah global.¹⁵

Oleh karena itu, dalam kerangka konstitusi



Republik Lituania, terdapat upaya yang jelas dan berkelanjutan untuk meningkatkan hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat dan mengurangi ketergantungan pada Rusia. Upaya-upaya ini dilakukan dengan tujuan menjaga otonomi negara dan memperkuat posisinya di kancah global.

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Lituania berbeda karena penekanannya pada upaya derussifikasi, meskipun Lituania dulunya adalah negara konstituen Uni Soviet. Hal ini menunjukkan upaya bersama untuk menjaga identitas nasional dan meningkatkan otonomi negara. Terlepas dari hubungan historis Lituania dengan Uni Soviet, negara ini telah menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi dampak dan hegemoni budaya Rusia di bidang politik, sosial, dan budaya. Inisiatif tersebut mencakup perumusan silabus pendidikan yang

¹⁵ Smith, M., & Shaw, J. (2020). Changing politics and electoral rights: Lithuania's accession to the EU. In *Migration, Diasporas and Legal Systems in Europe* (pp. 145-162). Routledge-Cavendish.

memprioritaskan bahasa Lituania dan sejarah nasional, serta keputusan yang disengaja untuk tidak menggunakan bahasa Rusia di bidang administrasi publik.

Penerapan program derussifikasi menunjukkan upaya bersama untuk meningkatkan identitas nasional Lituania dan menegaskan kedaulatan bangsa. Tujuan Lituania adalah untuk mempertahankan otonomi budaya dan politiknya dari pengaruh luar melalui promosi bahasa dan budaya Lituania. Kebijakan derussifikasi dapat diartikan sebagai respons terhadap gejolak sejarah pemerintahan Soviet. Negara ini bertujuan untuk mengkaji dan mengungkap pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama pendudukan Soviet, dan menjamin bahwa pertemuan ini tidak diabaikan.¹⁶

Oleh karena itu, dalam kerangka konstitusi Republik Lituania, penerapan kebijakan derusifikasi muncul sebagai wujud nyata dari upaya kuat untuk memperkuat identitas nasional, menjaga warisan budaya, dan mengatasi konteks sejarah pemerintahan Soviet yang rumit. Ciri ini merupakan ciri khas suatu bangsa dalam kerangka regionalnya yang beraneka segi.

¹⁶ Kascian, K. (2021). Lithuania's Minority Representation in the European Parliament: Just Poles?. *Intersections. East European Journal of Society and Politics*, 7(1), 116-135.

C. EPILOG

Lituania adalah negara demokratis, bukan monarki. Hal ini menyiratkan bahwa alokasi otoritas politik di negara ini berada di tangan rakyat atau perwakilan terpilih, bukan pada raja yang memegang posisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pemerintahan Lituania disusun sebagai Republik Parlementer, sebagaimana ditetapkan oleh konstitusinya. Pemerintah, dipimpin oleh seorang perdana menteri, memegang kekuasaan eksekutif utama dalam sistem ini, sedangkan Seimas, parlemen nasional, memegang kekuasaan legislatif. Struktur pemerintahan Lituania dicirikan oleh kombinasi sistem parlementer dan presidensial, dengan kecenderungan ke arah parlementerisme. Meskipun presiden memegang posisi penting dalam politik dan pemerintahan negara, tanggung jawab otoritas eksekutif sehari-hari berada di tangan perdana menteri dan kabinetnya. Republik Lituania dicirikan oleh sistem pemerintahan campuran, dimana otoritas politik berada di tangan rakyat melalui Seimas, sedangkan pemerintahan negara diatur oleh konstitusi yang menggambarkan alokasi kekuasaan di antara berbagai cabang otoritas.

Lituania telah meninggalkan dampak tersendiri pada bekas negara anggotanya, Uni Soviet, yang sekarang dikenal sebagai Rusia. Penegasan ini didasarkan pada latar belakang sejarah yang luas dan beragam, mencakup puncaknya sebagai kadipaten yang tangguh di Eropa Timur dan era pengaruh Uni

Soviet. Pemulihan kemerdekaan pada tahun 1990 dan transisi berikutnya menjadi republik yang kuat mempunyai lintasan sejarah yang khas.

Meskipun letak geografisnya di Eropa Timur, Republik Lituania menunjukkan dedikasi yang teguh terhadap prinsip-prinsip Barat. Dedikasi Lituania terhadap prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan, dan integrasi Barat terlihat jelas dalam keanggotaannya di Uni Eropa dan NATO. Salah satu karakteristik penting dari entitas ini adalah upayanya untuk meningkatkan hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat. Lituania secara aktif mempromosikan bahasa, budaya, dan identitas nasionalnya, terutama melalui program derusifikasi, meskipun memiliki hubungan historis dengan Uni Soviet. Salah satu ciri khas bangsa ini adalah upayanya meningkatkan jati diri bangsa dan menjaga warisan budaya.

REFERENSI:

- Bakaveckas, A., & Krikščiūnas, B. (2021). Regulation of the principle of separation of powers in the constitution of the Republic of Lithuania. In SWS International scientific conference on social s
- Jarašiūnas, E. (2004). The 1992 Constitution of the Republic of Lithuania in the wider context of constitutional development. *Jurisprudence*. Vilnius: LTU Leidybos centras, 2004, vol. 50 (42).
- Kascian, K. (2021). Lithuania's Minority Representation in the European Parliament: Just

- Poles?. Intersections. *East European Journal of Society and Politics*, 7(1), 116-135.
- Mesonis, G. (2008). The President of the Republic of Lithuania and the Constitutional Principle of the Separation of Powers. *Jurisprudencija: mokslo darbai*. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2008, Nr. 9 (111).
- Nakrošis, V. (2022). Lithuanian Civil Service Reform 1990–2018: From the Communist Legacy to a Professional Administration. In *Public Service Evolution in the 15 Post-Soviet Countries: Diversity in Transformation* (pp. 327-363). Singapore: Springer Nature Singapore.
- Pivoras, S. (2008). Post-soviet transformation of bureaucracy in Lithuania: main features and trends. *Baltic Journal of Law & Politics*, 1(1), 111-131.
- Pivoras, S. (2010). Model of civil service in Lithuania's public policy. *Baltic Journal of Law & Politics*, 3(1), 99-124.
- Prokop, K. (2016). Functions of the President of the Republic of Lithuania in the Light of the Constitution of 1992. *Bialstockie Studia Prawnicze*, 20, 273.
- Pūraitė-Andrikienė, D. (2020). Objects of Verification of the Constitutionality of Legal Acts in the Constitutional Court of the Republic of Lithuania. *Teisė*, 116, 72-91.
- Pūraitė-Andrikienė, D. (2023). Towards an Effective Constitution in Lithuania: the Role of the

- Constitutional Court. *Review of Central and East European Law*, 48(2), 134-165.
- Pūraitė-Andrikienė, D. (2023). Towards an Effective Constitution in Lithuania: the Role of the Constitutional Court. *Review of Central and East European Law*, 48(2), 134-165.
- Pūraitė-Andrikienė, D. The Lithuanian Constitutional Court: The gradual emergence of a strong guardian. In *Constitutional Review in Central and Eastern Europe* (pp. 168-189). Routledge.
- Šaparnienė, D., & Lazauskienė, A. (2012). Local government in Lithuania. *Local government in the Member States of the European Union: a comparative legal perspective*, 389-410.
- Šinkūnas, H. (2021). Constitutional Principles As a Criterion for Declaring Legal Regulation to Be Incompatible with the Constitution of the Republic of Lithuania. *Legal Developments During 30 Years of Lithuanian Independence: Overview of Legal Accomplishments and Challenges in Lithuania*, 245-260.
- Smith, M., & Shaw, J. (2020). Changing politics and electoral rights: Lithuania's accession to the EU. In *Migration, Diasporas and Legal Systems in Europe* (pp. 145-162). Routledge-Cavendish.
- Žemčiugov, A. (2019, May). Significance and peculiarities of the Constitution of the Republic of Lithuania. In *INDIVIDUAL. SOCIETY. STATE. Proceedings of the International Student and Teacher Scientific and Practical Conference* (pp. 294-301).